



#2023
KKP THRIVE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



STASIUN PSDKP CILACAP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

 @STASIUN_PSDKPCILACAP

 KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNCILACAP

 (0282) 5565152

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 15 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes, S.Pi, M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pada awal Tahun 2023 terdapat 8 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Namun pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat revisi perjanjian kinerja yang menyebabkan adanya penambahan 2 Sasaran Strategis, sehingga jumlah Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Cilacap menjadi 10, yaitu: (1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; (5) Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan; (6) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya; (7) Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan; (8) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; (9) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan (10) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Revisi perjanjian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 juga menyebabkan penambahan IKU yang semula sejumlah 23 IKU menjadi 28 IKU. Dari total 28 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap terdapat 15 (lima belas) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), 12 (dua

belas) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%) dan 1 (satu) IKU berwarna kuning (terealisasi 70-<90%).

Realisasi anggaran tahun 2023 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sampai 31 Desember 2023 sebesar **Rp.30.173.503.113,-** (*Tiga puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah*) atau **99,33%** dari total anggaran yang di alokasikan yaitu **Rp. 30.376.404.000,-** (*Tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip budget follow program secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2023.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	16
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023.....	16
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023	16
B. Analisis Pencapaian Kinerja	19
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	19
2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	22
3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan.....	29
4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	35

5. Sasaran Kegiatan 2.2 : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	44
6. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	47
7. Sasaran Kegiatan 3.2 : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	53
8. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	55
9. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	62
10. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	65
BAB IV Penutup	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
LAMPIRAN	97

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023.....	13
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023	17
Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 1 dengan Renstra 2020-2024.....	20
Tabel 4. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	20
Tabel 5. Perbandingan capaian IKU 1 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	21
Tabel 6. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024.....	22
Tabel 7. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara	24
Tabel 8. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas pada tahun 2023.....	26
Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	27
Tabel 10. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	28
Tabel 11. Perbandingan capaian IKU 5, dan 6 dengan Renstra 2020-2024.....	30
Tabel 12. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	32
Tabel 13. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	33
Tabel 14. Perbandingan IKU 6 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	34
Tabel 15. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	35
Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024.....	35
Tabel 17. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya	37
Tabel 18. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya	40
Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara	44
Tabel 20. Perbandingan capaian IKU 8 dengan Renstra 2020-2024.....	45
Tabel 21. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat bidang kelautan	46
Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara	47
Tabel 23. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	47
Tabel 24. Perbandingan capaian IKU 9 dengan Renstra 2020-2024.....	48
Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara	52
Tabel 26. Perbandingan capaian IKU 8 dengan Renstra 2020-2024.....	54
Tabel 27. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat bidang perikanan	54
Tabel 28. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara	55
Tabel 29. Capaian IKU 11, 12 dan 13 tahun 2023	55
Tabel 30. Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2023	58
Tabel 31. Perbandingan pencapaian IKU 11 dengan organisasi setara	59
Tabel 32. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan	60
Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 12 dengan organisasi setara	60
Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 13 dengan organisasi setara	62
Tabel 35. Capaian IKU 14 tahun 2023	62
Tabel 36. Rincian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan	63
Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 14 dengan organisasi setara	64
Tabel 38. Perbandingan capaian IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	66
Tabel 39. Perbandingan pencapaian IKU 15 dengan organisasi setara	68

Tabel 40. Perbandingan capaian IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	68
Tabel 41. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara	70
Tabel 42. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024.....	72
Tabel 43. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara	73
Tabel 44. Perbandingan capaian IKU 18 dengan Renstra 2020-2024.....	74
Tabel 45. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara	75
Tabel 46. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN.....	76
Tabel 47. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara	77
Tabel 48. Perbandingan capaian IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP	78
Tabel 49. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara	78
Tabel 50. Perbandingan capaian IKU 21 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	79
Tabel 51. Perbandingan pencapaian IKU 21 dengan organisasi setara	80
Tabel 52. Perbandingan capaian IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	81
Tabel 53. Perbandingan pencapaian IKU 22 dengan organisasi setara	82
Tabel 54. Perbandingan capaian IKU 23 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (inovasi).....	83
Tabel 55. Perbandingan pencapaian IKU 23 dengan organisasi setara	83
Tabel 56. Perbandingan capaian IKU 24 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	84
Tabel 57. Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi setara	85
Tabel 58. Perbandingan capaian IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.....	86
Tabel 59. Perbandingan pencapaian IKU 25 dengan organisasi setara	87
Tabel 60. Perbandingan capaian IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	88
Tabel 61. Perbandingan pencapaian IKU 26 dengan organisasi setara	88
Tabel 62. Perbandingan pencapaian IKU 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai).....	89
Tabel 63. Perbandingan pencapaian IKU 27 dengan organisasi setara	90
Tabel 64. Perbandingan pencapaian IKU 28 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	91
Tabel 65. Perbandingan pencapaian IKU 28 dengan organisasi setara	91
Tabel 66. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP tahun 2023	93
Tabel 67. Penghargaan yang Diterima Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2023.....	93

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	5
Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023	16
Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah.....	37
Gambar 4. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Jenis Ikan yang di Lindungi Tahun 2023	40
Gambar 5. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023.....	42
Gambar 6. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan yang Merusak (<i>Destructive Fishing</i>) Tahun 2023.....	43
Gambar 7. Sebaran Lokasi Data&Informasi Intelijen Pengawasan Kelautan Tahun 2023....	45
Gambar 8. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	49
Gambar 9. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor budidaya ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	50
Gambar 10. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	51
Gambar 11. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	52
Gambar 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	67
Gambar 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	70
Gambar 14. Nilai SMART melalui aplikasi SMART DJA.....	92
Gambar 15. Stasiun PSDKP Cilacap menerima penghargaan Terbaik I	94

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor B.2108/PSDKPSta.1/KP.440/X/2023 yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan ST tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6) Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan.

d) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

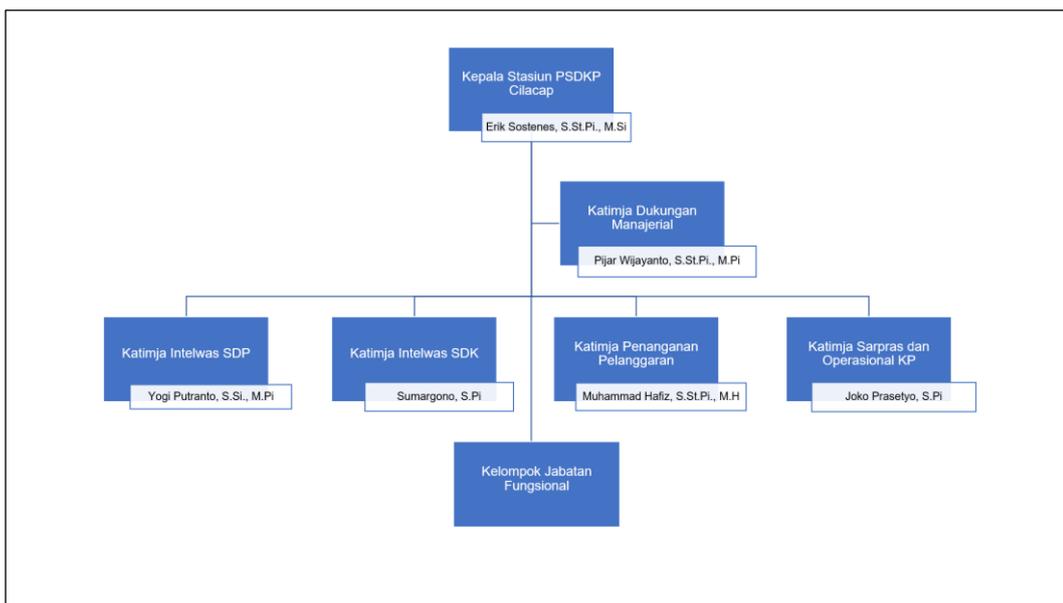
f) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada tahun 2023 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran SPKP khususnya di Wilker PSDKP Tegal dan Satwas SDKP Pati yang masih masif perlu mendapatkan atensi khusus;

- b. Adanya mekanisme penghapusan denda administratif terhadap 2 (dua) kapal (KM. Kinantan Kurmina Jaya dan KM. Berkelana 2) sejumlah Rp.370.563.416 yang telah terkena musibah terbakar (keadaan di luar kemampuan yang mengakibatkan kapal tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan kegiatan perikanan);
- c. Adanya permasalahan terkait tambak udah illegal di Taman Nasional Karimunjawa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan masih terus berlanjut penanganannya hingga tahun 2024. Ada 7 (tujuh) pelaku usaha yang tidak kooperatif dan dilakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemasangan pipa inlet di laut, 4 (empat) pelaku usaha sudah dalam proses penyidikan oleh KLHK, dan 3 (tiga) lainnya dari Tim Gakkum KLHK menawarkan kepada Stasiun PSDKP Cilacap untuk memproses hukumnya. Hal ini menyangkut kewenangan dan tupoksi maka perlu kehati-hatian dan dikaji mengingat lokasinya di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa;
- d. Adanya permasalahan terkait pembangunan *breakwater* KRIB di Rembang yang merupakan reklamasi seluas 0,9 Ha dan tidak memiliki perizinan PKKPR. Pelaku usaha atas nama Budhi Setiawan sudah membayar denda administrasi, namun status daratannya saat ini belum dilakukan kajian teknis oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk kejelasan aset dan pemanfaatannya.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada awal tahun dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 revisi terakhir.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diusung dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan

5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada awal periode tahun 2023 adalah 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama. Namun pada Triwulan IV Tahun 2023 telah terjadi perubahan pada perencanaan

dan penganggaran sehingga adanya revisi Perjanjian Kinerja yang mengakibatkan penambahan Sasaran Kegiatan menjadi 10 (Sepuluh) dan Indikator Kinerja Utama menjadi 28 (Dua puluh delapan). Target pada setiap SK dan IKU ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80 Tetap
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	87,6 Tetap
		ISK1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	87,6 Tetap
		ISK1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100 Tambahan
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100 Tetap
		ISK1.3.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100 Tetap
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100 Ada perubahan
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100 Tambahan
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100 Ada perubahan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	Tambahan
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	Ada perubahan
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	Tambahan
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penerapan Sanksi Administratif (Indeks)	80	Tambahan
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	Ada perubahan
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP					
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	Tetap
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	Tetap
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75	Ada perubahan
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100	Tetap
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	78	Tetap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET	
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80,5	Ada perubahan
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	Tetap
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	Tetap
		ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	Tetap
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	92	Tetap
		ISK5.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	Tetap
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	Tetap
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,75	Ada perubahan
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82	Tetap

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).

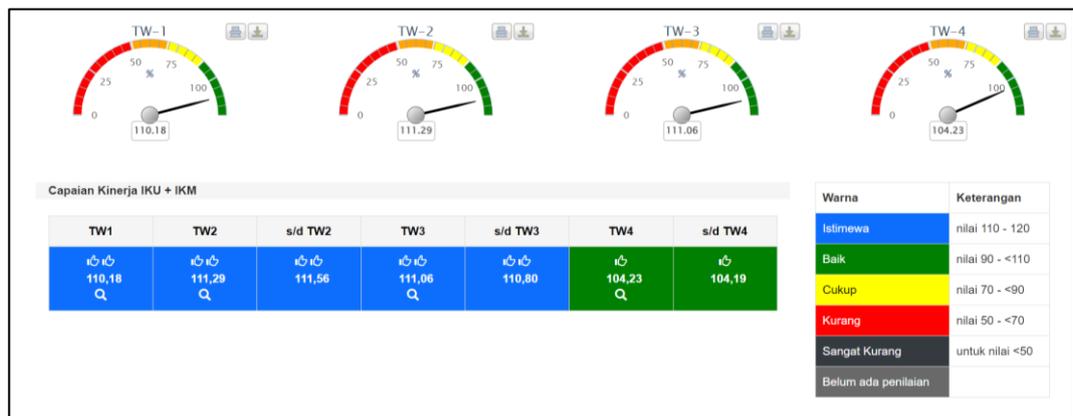
BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 10 Sasaran Kegiatan dengan 28 IKU. Nilai Kinerja (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar 104,19% dengan kategori biru (istimewa) sebanyak 15 IKU, kategori hijau (baik) sebanyak 12 IKU serta kategori kuning (cukup) sebanyak 1 (satu) IKU, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120%
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	87,6	100	114,16%
		ISK1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	87,6	98,33	112,08%
		ISK1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100%
		ISK1.3.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100%
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	100	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100%
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	100	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120%
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	60	75%
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80	100	120%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	100	93%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,03	112,24%
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,83	115,10%
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75	88,92	118,56%
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	78	88,26	113,15%
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80,5	89,70	111,43%
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	100	120%
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	27,84	120%
		ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	100%
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	92	108,33	111,08%
		ISK5.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	100	120%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	85,40	110,19%
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,75	94,89	101,22%
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82	85,93	104,79%

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

No	Warna	Keterangan
1		Istimewa (Nilai 110-120)
2		Baik (Nilai 90 ≤ 100)
3		Cukup (Nilai 70 ≤ 90)
4		Kurang (Nilai 50 ≤ 70)
5		Belum Ada Penilaian

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 1 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 1 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	-	-	-	-	-	-	80	100	-

Kegiatan “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)” tahun 2023 tercapai dengan nilai 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 120%. Nilai capaian tersebut didapatkan dari komponen penilaian kegiatan pokmaswas sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

No	Nama Kegiatan	Realisasi	Bobot	%	Perhitungan Capaian
1	Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan POKMASWAS	1	20	100	20
2	Pendataan Keaktifan POKMASWAS	1	30	100	30
3	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan	1	50	100	50
Indeks					100

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 1 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan pokmaswas dilakukan dengan mengundang pemateri/narasumber dari instansi yang terkait (Pemda, Komisi IV DPR RI, dan pengawas perikanan) sehingga masyarakat dapat melakukan diskusi dan tanya jawab serta dapat memahami perannya sebagai pokmaswas; serta
2. Eselon II teknis melakukan supervisi secara rutin untuk memantau terkait pelaksanaan pembinaan pokmaswas.

Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga periode perhitungan serta jenis IKU nya berbeda. Pada tahun 2022 IKU yang terkait dengan pokmaswas berbunyi “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”, begitu pula pada Renstra 2020-2024 yang berbunyi “Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, sehingga antara IKU tahun 2023, 2022 dan IKU yang tercantum pada Renstra 2020-2024 terdapat perbedaan di perhitungan, data dan kegiatan.

Pelaksanaan pembinaan pokmaswas sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilaksanakan di 13 (tiga belas) lokasi, yaitu di Kebumen, Tulungagung I, Cilacap I, Wonogiri, Jombang I, Jombang II, Tulungagung II, Rembang, Trenggalek,

Cilacap II, Madiun, Wonosobo I, dan Wonosobo II. Jumlah pokmaswas yang telah dibina pada tahun 2023 adalah 106 pokmaswas, tersebar pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sedangkan perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU ini antar organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Perbandingan capaian IKU 1 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

Pada pelaksanaannya IKU 1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks) turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP melalui pembinaan kepada pokmaswas agar turut membantu melakukan kegiatan pengawasan terhadap Program Turunan Kebijakan Ekonomi Biru poin ke 4 yaitu “Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)” di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap. Diharapkan dengan dilaksanannya pembinaan terhadap pokmaswas maka keikutsertaan pokmaswas dalam kegiatan pengawasan PWP3K dapat mendukung pelaksanaan implementasi Kebijakan Ekonomi Biru.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.266.400.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.1.260.092.056,- atau 99,50%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,50%.

2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, maka SK 1.2 tersebut diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas, IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 2, 3 dan 4 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	85	85,58	87,6	100	-
2	IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	-	-	-	-	85	100	87,6	98,33	-
3	IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	-	-	-	-	90	100	100	100	-

Capaian IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2023 adalah 100, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 87,6, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 114,16%. Perbandingan dengan tahun 2022 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,45 (semula 85,58 menjadi 100), namun perlu diperhatikan juga karena target antar tahun tersebut berbeda.

Capaian IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2023 adalah 98,33, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 112,25%. Perbandingan dengan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,67 (semula 100 menjadi 98,33), hal ini dikarenakan terdapat kebocoran pada body Rigid Inflatable Boat (RIB) sehingga menghambat dalam pelaksanaan operasi salah satu speedboat. Namun untuk saat ini kebocoran pada RIB sudah diperbaiki melalui mekanisme perawatan darurat.

Capaian IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas pada tahun 2023 adalah 100%, pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan dengan tahun 2022 juga menunjukkan capaian yang setara, karena pada tahun 2022 juga IKU ini tercapai sebesar 100%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 2, 3, 4 adalah sebagai berikut:

1. Pada operasi kapal pengawas dan *speedboat* telah dilakukan penjadwalan dan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien.
2. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja kapal pengawas dalam melakukan pengawasan, dan pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap telah didukung secara anggaran dengan dilakukannya revisi anggaran yang bertujuan untuk menutupi kompensasi kenaikan harga BBM dan untuk penambahan hari operasi terkait adanya indikasi peningkatan kerawanan *illegal fishing* pada WPP 712 di akhir tahun 2023.
3. Telah dilakukannya monitoring dan penjadwalan dalam pemenuhan logistik armada pengawas, serta pelaporan sisa dan kebutuhan armada yang terintegrasi, sehingga logistik untuk kapal pengawas terpenuhi dan capaian kinerja dapat memenuhi target.

Ketiga IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, 2021, maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Ketiga IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaiannya.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan kapal pengawas dan speedboat pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, (2) “Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)” dan (3) “Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)” . Perbedaan antara ketiga IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%);
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan kapal pengawas sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Hiu 04 dengan periode operasi pada tahun 2023. Rincian operasi KP. Hiu 04 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Armada	Capaian Hari Operasi		Kapal Perikanan yang Diperiksa	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	KP. Hiu 04	80	86	160	187

Data diatas menunjukkan bahwa operasi kapal pengawas sudah memenuhi target capaian hari operasi dan jumlah kapal perikanan yang diperiksa. Kapal perikanan yang diperiksa KP. Hiu 04 sebanyak 187 unit kapal perikanan (185 KII diizinkan lanjut berlayar, dan 4 KII ditangkap untuk pemeriksaan lanjutan).

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSKDP sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,16%
2	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	99,41	113,48%
3	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,16%
4	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	96,16	109,77%

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	95,94	109,52%
6	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,16%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	98,92	112,92%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	99,53	113,62%

Pada pelaksanaannya IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks) turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 2 “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota” dan poin ke 1 “Memperluas kawasan konservasi laut” di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap. Pelaksanaan operasi kapal pengawas di wilayah yang menjadi zona PIT dan kawasan konservasi tentunya akan membantu pelaksanaan peningkatan kepatuhan terhadap implementasi PIT dan pengawasan kawasan konservasi sebagai dukungan terhadap Kebijakan Ekonomi Biru.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.555.097.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.525.376.220,- atau 99,55%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%.

IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Speedboat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan (40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (40%);
- 3) Tindak lanjut target operasi intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan, dan dukungan SAR (15%); dan
- 4) Hasil dukungan lainnya, penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon dan operasi bersama (5%).

Pengukuran IKU Indeks kinerja operasi speedboat pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan speedboat pengawas sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : RIB Sea Rider, Rubber Boat, Marlin 09, Dolphin 029, Marlin 03, Napoleon 033, Napoleon 034, dan Napoleon 012.

Kegiatan operasi speedboat pengawas ditargetkan sejumlah 30 hari operasi yang merupakan rata-rata dari keseluruhan jumlah operasi 8 speedboat pengawas tersebut. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan operasi speedboat pengawas perikanan sebanyak 240 hari operasi (rata-rata 30 hari), dengan total riksa kapal sebanyak 502 unit kapal perikanan yang diizinkan untuk lanjut berlayar (dokumen perizinan lengkap). Rincian capaian hari operasi dan jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh Speedboat/RIB/Rubber Boat Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas pada tahun 2023

No	Speedboat/ Rib/ Rubber Boat	Capaian Hari Operasi		Kapal Perikanan yang Diperiksa	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Napoleon 012	30	30	25	85
2	Napoleon 033	30	30	35	58
3	Napoleon 034	30	30	30	53
4	Dolphin 029	30	30	30	71
5	Marlin 03	30	30	23	66
6	Marlin 09	30	30	31	62
7	Rigid Inflatable Boat	30	30	20	15
8	Rubber Boat	30	30	28	92
Jumlah		240	240	222	502
Rata-rata		30	30	27,75	62,75

Operasi speedboat pengawas telah mencapai target capaian hari operasi. Komponen pada data diatas yaitu data kapal yang diperiksa memberikan nilai sebanyak 40% untuk nilai capaian keseluruhan.

Stasiun PSDKP Cilacap didukung oleh 6 Unit Speedboat, 1 unit Rigid Inflatable Boat, serta 1 unit Rubber Boat yang digunakan dalam pengawasan dengan cakupan <12 mil laut. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan dukungan speedboat pengawas tersebut sudah efisien. Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	94,12	107,44%
2	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,16%
3	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,16%
4	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	99,43	113,50%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	93,67	106,93%
6	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,16%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	97,94	111,80%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	91,57	104,53%

Pada pelaksanaannya IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks) turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 2 “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota” dan poin ke 4 “Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)”. Pelaksanaan operasi speedboat dengan cakupan <12 mil laut tentunya akan membantu pelaksanaan peningkatan kepatuhan terhadap implementasi PIT dan juga pengawasan terhadap PWP3K di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap sebagai dukungan terhadap Kebijakan Ekonomi Biru.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.173.990,000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.1.151.17.7794,- atau 98,06%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 98,06%.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal (BBM, Pelumas, Alat Pelayanan) dan pemenuhan logistik personal (Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api), yang pada Stasiun PSDKP Cilacap ditujukan untuk pemenuhan logistik terhadap 1 (satu) kapal pengawas, yaitu KP. Hiu 04.

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Hingga akhir tahun 2023, seluruh pemenuhan logistik kapal dan logistik personal untuk KP. Hiu 04 sudah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebutuhan Logistik Kapal/Personil	Pemenuhan		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak	
1	BBM	√		- Dilakukan pembelian BBM dengan mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga - Terdapat BA Penggunaan BBM dan Sisa BBM Akhir Bulan
2	Pelumas	√		- Terdapat bukti pembelian pelumas untuk kapal berupa BAST - Terdapat surat permintaan pemenuhan pelumas
3	Alat Pelayanan (ATK/Bahan Komputer)	√		- Terdapat bukti pembelian alat pelayanan untuk kapal (SPJ)
4	Bahan Makanan/Natura	√		- Terdapat bukti pembelian natura untuk kapal (SPJ)
5	Air Bersih	√		- Terdapat bukti pembelian air bersih untuk kapal (SPJ)
6	Senjata Api dan Amunisi	√		- Terdapat laporan stock opname senjata api dan amunisi

Perbandingan capaian IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Pada pelaksanaannya IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 2 “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota”. IKU ini menekankan terkait kinerja terhadap pemenuhan logistik yang akan digunakan kapal pengawas dalam melakukan operasi. Diharapkan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik pada armada di Stasiun PSDKP Cilacap yaitu KP. Hiu 04 maka pelaksanaan operasi di zona PIT tidak akan mengalami hambatan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.546.135.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.516.923.724,- atau 99,55%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%.

3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, maka SK 1.3 tersebut diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 5 Persentase penyelesaian pembangunan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**, dan **IKU 6 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 5 dan 6 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perbandingan capaian IKU 5, dan 6 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 5 Persentase penyelesaian pembangunan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	100	100	100	100	-
2	IKU 6 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	100	100	100	100	-

Capaian IKU 5 Persentase penyelesaian pembangunan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dan juga IKU 6 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP pada tahun 2023 adalah 100, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada masing-masing IKU. Perbandingan dengan tahun 2022 juga menunjukkan capaian yang setara, karena pada tahun 2022 juga IKU ini tercapai sebesar 100%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

1. Pada penyelesaian pembangunan secara rutin dilakukan supervisi oleh Eselon II pembina teknis dengan melibatkan langsung pihak penyedia, konsultan perencana dan konsultan pengawas, sehingga pelaksanaan Pembangunan selesai tepat waktu.
2. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk menyusun mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga). Selain itu juga dilakukan monitoring untuk setiap sarana dan prasarana yang telah setelah digunakan.

Kedua IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, 2021, maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Kedua IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaiannya.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Jumlah speedboat pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”, (2) “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)” dan (3) “Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”. Perbedaan antara kedua IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 1.3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan adalah sebagai berikut:

IKU 5 Persentase penyelesaian pembangunan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Prasarana Pengawasan SDKP meliputi (1) Prasarana pengawasan utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga); dan (2) Prasarana pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase).

Pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap memiliki target pengadaan prasarana pengawasan pendukung berupa pembangunan konstruksi/fisik Pos Jaga dan Pagar Satwas PSDKP Pati yang beralamat di Jl. Area Tambak, Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pengawasan pendukung tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100%.

Capaian pada IKU ini telah memenuhi target 100% pada tanggal 5 Agustus 2023 (pembangunan Pagar Satwas SDKP Pati) dan 8 Agustus 2023 (pembangunan Pos Jaga Satwas SDKP Pati) dengan telah di tandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Pembayaran (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Stasiun

PSDKP Cilacap dengan pihak luar selaku penyedia jasa pembangunan Pagar dan Pos Jaga Satwas SDKP Pati.

Perbandingan capaian IKU Pemenuhan Presentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
1	Stasiun PSDKP Belawan	60	57,04	95,07%
3	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
4	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

Untuk mencapai indikator Pemenuhan Presentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.400.000.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.396.234.516,- atau 99,06%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,06%.

IKU 6 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap yang dirawat meliputi: 1 (Satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (Delapan) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Perhitungan capaian IKU Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP terdiri dari :

- 1) Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) (bobot 50%)
- 2) Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) (bobot 40%)
- 3) Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) (bobot 10%)

Pelaksanaan kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Periode pelaporan untuk IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun berkenaan (tahunan).

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan perawatan untuk mendukung IKU 6 ini telah selesai dilaksanakan terhadap 1 unit Kapal Pengawas dan 8 unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrolu yang dilakukan oleh Kapal Pengawas dan Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patrolu pada tahun berjalan. Rincian perawatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1	KP. HIU 04	- Perawatan rutin - Docking - Servis perlengkapan keselamatan	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan GPS Ploter dan Radio SSB
2	Napoleon 012	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: shaft drive, collar shaft, pinion gear set, shim, seal, spring pin, bearing, filter water port, filter water stbd, screw, trim assy, bush set, prop
3	Napoleon 033	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	
4	Napoleon 034	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	Pemeliharaan darurat dengan uraian pekerjaan: bosch injektor, anode kit, anode assy, fuel filter fc 2909, racor, impeller, oil filter, sender fuel tank
5	Dolphin 029	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	
6	Marlin 03	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	- Penggantian stir kemudi
7	Marlin 09	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	

8	Rigid Inflatable Boat	- Perawatan rutin - Docking	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: penambalan RIB yang bocor, pengeleman accesoris boat yang rusak, pembersihan teritip pada lambung kapal dibawah garis air dan melapisi fiberglass
9	Rubber Boat	- Perawatan rutin	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan perlengkapan kapal	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: tune up mesin suzuki 40 PK, busi, oli gear box, impeller

Perbandingan capaian IKU persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Perbandingan IKU 6 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

Pada pelaksanaannya IKU 6 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 1 “Memperluas kawasan konservasi laut”, poin ke 2 “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota” dan poin ke 4 “Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)”. IKU ini menekankan terkait kinerja terhadap perawatan sarana dan prasarana pengawasan dalam melakukan operasi. Diharapkan dengan terawatnya armada operasi (Kapal Pengawas/Speedboat/RIB/Rubber Boat) maka pelaksanaan operasi di zona PIT dan kawasan konservasi bagi kapal pengawas, dan juga di wilayah cakupan <12 mil laut serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak akan mengalami hambatan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.265.100.000, dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar

Rp.2.259.753.480,- atau 99,76%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,76%.

4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, maka SK 2.1 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 7 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)”**. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Ukuran keberhasilan IKU 7 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 15. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel 14, maka didapatkan nilai capaian IKU 7 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 7 Nilai Kualitas penyelesaian	-	-	95	100	100	100	100	100	-

	pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada tahun 2023 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2021, namun antara tahun 2021, 2022 dan 2023 terdapat perbedaan yang terletak pada nomenklatur IKU. Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat kata “persentase penyelesaian”, sedangkan pada tahun 2023 “nilai kualitas penyelesaian”.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan pada Renstra 2020-2024 adalah “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”. Perbedaan antara IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke 7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
3. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Kegiatan utama pada IKU 7 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dibagi ke dalam 6 (enam) sub sektor kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran)

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang

berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya terhadap 15 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 15 pelaku usaha. Sebaran lokasi pengawasan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.49.800.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.49.798.378,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

2. Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut terhadap 5 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 17. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort)	PT. Wisata Laut Nusa Permai memiliki 5 KBLI yaitu 56101, 79121, 93242, 96122, 55110. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut dan

		<p>juga tidak memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. tetapi pelaku usaha telah melakukan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan seperti dermaga utama dengan luas 2562m², sunset jetty dengan luas 290 m², dan wave breaker dengan ukuran 1x 50 m dan 2 x 10 m. pelaku usaha telah melakukan permohonan PKKPRP kepada KKP dengan nomor 06/SP/PTWN/VIII/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 dan dilakukan verifikasi oleh Ditjen PRL pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil di TOLAK. Permohonan PKKPRP tidak disetujui dengan alasan yaitu memperbaiki detail koordinat dan luasan lokasi pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan, lokasi yang dimohonkan masuk dalam area taman nasional sehingga pemanfaatannya mengikuti ketentuan dari Zonasi Taman Nasional Karimunjawa.</p>
2.	PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2	<p>PT. PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2 bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga berbahan bakar batubara. pada saat dilakukan pemeriksaan, perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen PKKPRP, tetapi sebelumnya telah mengajukan permohonan PKKPRP pada tanggal 15 Desember 2022 dan diverifikasi pada tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil perlu adanya perbaikan. Perbaikan dokumen diberikan waktu 7 hari kerja dengan batas maksimal 3 Maret 2023 dimana bertepatan dengan inspeksi lapangan oleh Pengawas Perikanan dan akan mengirimkan berkas perbaikan ke Ditjen PRL.</p>
3.	PT. Kayu Lapis Indonesia	<p>PT. Kayu Lapis Indonesia belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut, dan diberi waktu untuk menyelesaikan dalam kurun waktu 6 bulan dari sejak berita acara ini di tandatangani. PT. Kayu lapis tidak dapat menunjukkan bukti perijinan ijin lokasi, ijin pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut Dirjen PPRP KKP. jika PT. Kayu Lapis Indonesia tidak memiliki dokumen perijinan setelah 6 bulan maka akan diberikan sanksi administratif .</p>
4.	PT. PLN Nusantara	<p>PT. PLN Nusantara sudah memiliki PKKPRP dan sesuai dengan dilapangan, Pelaku usaha bidang usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dan ruang laut di PLTU PT PJB UBJOM Pacitan sudah memiliki perizinan Persetujuan/ Konfirmasi KPRP Nomor : 13052210513500002 Tanggal Terbit Persetujuan/ Konfirmasi KPRP : 12 Mei 2022 dengan jenis kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik UBJO&M Pacitan. Dampak pelaksanaan dokumen KPRP terhadap penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil didapatkan hasil area penangkapan ikan tidak terganggu serta lokasi penangkapan ikan tidak terganggu. Tidak ditemukan indikasi dampak yang merugikan pelaksanaan dokumen PKKPRP terhadap penghidupan dan akses nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil.</p>

5.	Sdr. Budhi Setiawan	Sdr. Budhi Setiawan merupakan pengelola PT. Bumi Rejo Tirta Kencana yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Rembang. Perusahaan tersebut belum memiliki izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Izin Reklamasi. berdasarkan berita acara pengukuran volume terdapat 8 (delapan) krib eksisting di sekitar lokasi dengan tujuan mencegah abrasi, yang terindikasi tanpa perizinan baik milik pemda, swasta atau perorangan, dan seharusnya juga mendapatkan tindakan hukum yang sama. Rekomendasi yaitu Penanggung jawab berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang untuk secara kolektif mengurus perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut selambatnya Desember 2023 dan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk verifikasi perizinan setelah diberi waktu untuk mengurus izin KKPR
----	---------------------	---

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.973.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.31.969.108,- atau 99,99%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

3. Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi terhadap 6 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Jenis Ikan yang di Lindungi Tahun 2023

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.722.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.722.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

4. Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan terhadap 3 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana gambar dibawah ini:

Tabel 18. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Koperasi Tri Daya Abadi (UD. Garam Mutiara)	UD. Garam Mutiara merupakan satu satunya usaha garam di bawah koperasi Tri Daya Abadi sejak tahun 2018 dengan pemilik yaitu Sdri. Eva Julianti. Perusahaan tersebut memiliki 1 KBLI yaitu 10774 (Industri Pengolahan Garam) dengan mengolah garam krosok menjadi garam halus beryodium dengan kemasan 2 ons dan memiliki merk yaitu Garam Intan Putih. Teknologi yang digunakan sederhana dan hanya memiliki karyawan berjumlah 10 orang dengan pendistribusian hasil produksi masih wilayah lokal yaitu sekitaran Kabupaten

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		<p>Rembang dan hasil produksi 100 kg/hari. UD. Garam Mutiara memiliki luasan 2 Ha dan masih skala kecil. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI, Sertifikat Halal dari MUI Jawa Tengah. Rekomendasi untuk pelaku usaha untuk segera mengurus Sertifikat Standar guna melengkapi perizinan usaha dan segera migrasi OSS RBA.</p>
2.	Kugar Cirat Segoro	<p>Kugar Cirat Segoro merupakan usaha ekstraksi garam dan sekaligus wisata edukasi garam yang di resmikan oleh Bupati Kebumen pada tanggal 17 Desember 2020. Usaha garam tersebut hanya memiliki luasan tanah 2 Ha dengan tanah milik pribadi Bapak Budi Santoso. Pengelolaan usaha garam ini dibimbing oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) dengan kapasitas produksi garam setiap bulan 10 ton, serta memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas 100 ton. produk yang dihasilkan yaitu garam dapur, garam spa untuk kesehatan, dan ekstraksi air garam bittern untuk kesehatan. usaha garam ini sering dijadikan sebagai wahana edukasi studi pengolahan garam sering dikunjungi dari instansi pendidikan SD/SMP/SMA untuk belajar bagaimana mengolah air laut menjadi garam. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI, Sertifikat Halal dari MUI Jawa Tengah. Rekomendasi nya yaitu perlu adanya penambahan KBLI ALSE karena pemanfaatan air laut diambil langsung sebagai bahan produksi garam.</p>
3.	Kugar Jagad Kidul	<p>Kugar Jagad Kidul merupakan usaha ekstraksi garam yang didukung oleh Kepala Desa Miritpetikusan yaitu Bapak Ahmad Mafangil untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan desa dipinggir laut. usaha garam ini dikelola oleh Bpk. Puji Santoso sebagai ketua kelompok yang didirikan sejak tahun 2018 dengan luas 2 Ha. Hasil inspeksi lapangan usaha garam tersebut sedang tidak beroperasi , hal ini dikarenakan tunnel-tunnel tempat produksi garam dalam kondisi rusak/robok karena faktor cuaca (angin kencang), dari informasi usaha garam akan beroperasi kembali bulan Mei 2023. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI, Sertifikat Halal, Izin Edar Pangan dan Laik Usaha. Rekomendasi nya adalah untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Bakau) dengan berkoordinasi dengan Ditjen PRL karena memanfaatkan air laut untuk diolah menjadi garam.</p>

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan unit usaha produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.722.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.722.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

5. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 8 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 5. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.91.333.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 91.332.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini

didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

6. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) terhadap 15 pelaku usaha. Pengawasan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 15 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya berkaitan dengan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 6. Sebaran Lokasi Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) Tahun 2023

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan penangkapan ikan yang merusak/*destructive fishing* yang diperiksa kepatuhannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.500.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 58.499.500,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Pada pelaksanaannya IKU 7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan ini turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 1 “Memperluas kawasan konservasi laut”, poin ke 4 “Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)” serta poin ke 5 “Pembersihan sampah plastik dilaut melalui BCL”. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada sub sektor bidang kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap (pelaku usaha pemanfaat PWP3K, kawasan konservasi, pencemaran dll) akan turut mendukung peningkatan kepatuhan terhadap Kebijakan Ekonomi Biru.

5. Sasaran Kegiatan 2.2 : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2.2 “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 8 “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)”**. Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Setelah dilakukan perhitungan capaian maka didapatkan nilai capaian IKU 8 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan capaian IKU 8 dengan Renstra 2020-2024

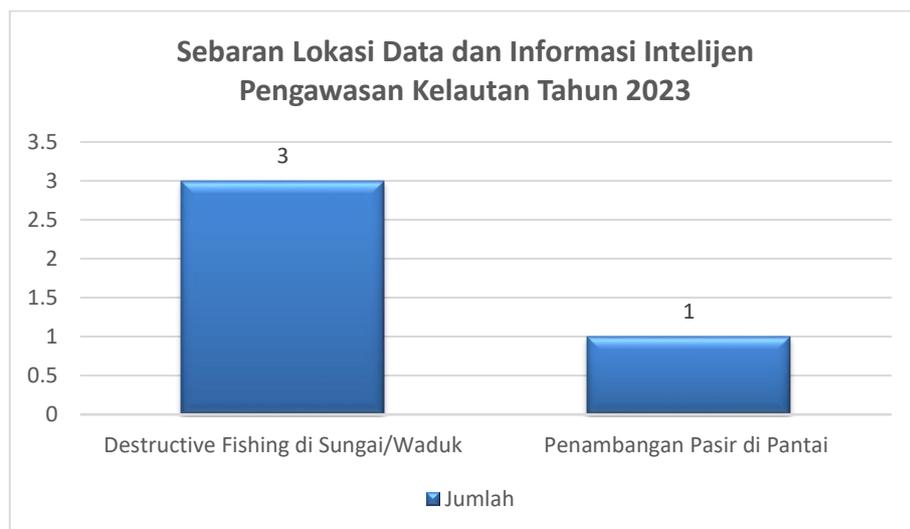
No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 8 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU tersedianya data dan informasi intelijen kelautan pada tahun 2023 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 8 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat diterapkan dengan baik di Stasiun PSDKP Cilacap; serta
3. Adanya koordinasi yang terjalin dengan instansi terkait (Pemda) sehingga penanganan pengaduan bisa cepat diselesaikan.

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) dugaan kasus hasil pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan oleh Stasiun PSDKP Cilacap. Sebaran lokasi data dan informasi intelijen pengawasan kelautan sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 7. Sebaran Lokasi Data dan Informasi Intelijen Pengawasan Kelautan Tahun 2023

Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat bidang kelautan

No	Tanggal	Aduan	Sumber	Tindaklanjut
1	25/05/2023	Dugaan adanya penggunaan racun dan penyetruman ikan di Sungai Serayu yang terjadi di daerah Kec. Sampang Kab. Cilacap dan Kec. Rawalo, Kab. Banyumas	Pelapor datang ke kantor Stasiun PSDKP Cilacap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan DKP Kab. Cilacap, Dinas Perikanan Banyumas, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Sampang terkait sosialisasi sebagai edukasi bagi masyarakat sekitar. 2. Telah dilakukan penyerahan banner/poster sebanyak 3 set di serahkan kepada masing masing desa (Rawalo dan Sampang). Banner/Poster tersebut berisi mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang berbahaya, pembuangan sampah sembarangan.
2	03/06/2023	Dugaan adanya Setrum Ikan di Bengawan Solo (Bacem - Sukorjo)	Pengaduan melalui E-Lapor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan Tindak Lanjut pada tanggal 23 Juni 2023 melalui Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor : B.1182/PSDKPSta.1/KP.440/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023. 2. Tindak Lanjut atas hasil PULBAKET pelaku diminta untuk menyerahkan alat Setrum ikan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyetruman kembali. Barang bukti dititipkan kepada dinas Pertanian dan Perikanan Kab Sukoharjo sebagai bahan sosialisasi dan alat peraga kepada masyarakat.
3	21/06/2023	Dugaan adanya penggunaan jala atau jaring ikan yang tidak terkontrol	Pengaduan melalui E-Lapor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Malang pada tanggal 4 Juli 2023 dalam hal ini menemui Bpk Betha Yudha, S.Pi (Kepala Seksi Bidang Penangkapan), Bpk Elvan Nur (penyuluh perikanan), Bpk Rahmat (Staff Bidang Budidaya), hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat tentang informasi bahwasanya terdapat penggunaan jala atau jaring ikan yang tidak terkontrol. 2. Berdasarkan keterangan terkait laporan penggunaan jaring ikan yang ada di wilayah Waduk Karangates, menurut Bpk Sukamdi (pokmaswas) kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dijelaskan bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan anggotanya merupakan kegiatan perikanan sebagai mata pencarian dengan skala usaha kecil.
4	07/06/2023	Dugaan adanya penambangan pasir laut	Pengaduan melalui formulir yang disediakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap	<p>Satwas SDKP Trenggalek melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Perikanan dan Pokmaswas Mina Lestari Kecamatan Panggul kemudian mendatangi lokasi yang menjadi tempat pengambilan pasir laut, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Pokmaswas Mina Lestari terkait larangan penambangan pasir laut 2. Melakukan pemasangan banner larangan penambangan pasir laut di pesisir Pantai Joketro, pesisir Pantai Konang, dan pesisir Pantai Kuyon.

Perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU tersedianya data dan informasi intelijen kelautan antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

6. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 9 “Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan”**. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Ukuran keberhasilan IKU 9 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 23. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan

2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel 23, maka didapatkan nilai capaian IKU 9 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan capaian IKU 9 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 9 Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada tahun 2023 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan juga Renstra 2020-2024, maka IKU 9 ini selalu mencapai target di setiap tahunnya.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke 9 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
3. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Pengawasan rutin berbasis OSS yang merupakan salah satu kegiatan utama pada IKU 9 terdiri dari 4 Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yaitu sebagai berikut.

1. Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan

Capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan salah satunya diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan

dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan Surat Tugas dan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2023 sebagaimana dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun 2023 capaian pengawasan rutin berbasis OSS subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 110 KBLI/Kode Proyek, terdiri dari pengawasan OSS dengan jumlah 31 KBLI/Kode Proyek dan 79 pengawasan lainnya yang bersifat isendental atau non OSS. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut).

2. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan

Capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan STKL dari OSS dan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan. Sebaran lokasi pemeriksaan usaha subsektor pembudidaya ikan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor budidaya ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun 2023 capaian pengawasan rutin berbasis OSS subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 204 Objek Pengawasan, terdiri dari pengawasan berijin OSS dengan jumlah 19 KBLI/Kode Proyek dan 204 pengawasan kepada kampung budidaya yang merupakan program prioritas nasional atau bersifat isendental. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh KBLI yang dominan adalah 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam). dengan lokasi pemeriksaan terbanyak ada di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jepara.

3. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan

Capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan salah satunya diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan sesuai dengan STKL dari OSS dan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun 2023 capaian pengawasan rutin berbasis OSS subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 97 Objek Pengawasan, terdiri dari pengawasan berijin OSS dengan jumlah 33 KBLI/Kode Proyek dan 64 pengawasan lainnya yang bersifat isendental. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) dengan lokasi pengawasan terbanyak ada di Kota Semarang.

4. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

Capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan dilakukan sesuai dengan STKL dari OSS dan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Kegiatan pengawasan usaha pengangkutan dan pemasaran ikan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan importasi ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan tahun 2023 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun 2023 capaian pengawasan rutin berbasis OSS subsektor distribudi di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 44 Objek Pengawasan, terdiri dari pengawasan berijin OSS dengan jumlah 9 KBLI/Kode Proyek dan 27 pengawasan lainnya yang bersifat isendentil atau non OSS. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dengan lokasi pengawasan terbanyak ada di Kota Semarang.

Apabila dilakukan perbandingan antara capaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Pada pelaksanaannya IKU 9 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan ini turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP poin ke 2 “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota”, dan poin ke 3 “Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan”. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada sub sektor bidang perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap (pelaku usaha penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran) akan turut mendukung peningkatan kepatuhan terhadap Kebijakan Ekonomi Biru. Selain itu dalam pelaksanaan PIT, pengawas perikanan juga turut berperan dalam peningkatan kepatuhan implementasi PIT pada “*before fishing*” dan “*after landing*”, yaitu terkait pengecekan SLO dan penerbitan HPKD kapal penangkapan ikan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.1.093.333.944,- atau 99,39 %, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 99,39%.

- 7. Sasaran Kegiatan 3.2 : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan**
- Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.2 “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 10 “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)”**. Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.
- Setelah dilakukan perhitungan capaian maka didapatkan nilai capaian IKU 10 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan capaian IKU 8 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 10 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU tersedianya data dan informasi intelijen perikanan pada tahun 2023 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 10 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat diterapkan dengan baik di Stasiun PSDKP Cilacap; serta
3. Adanya koordinasi yang terjalin dengan instansi terkait (Pemda) sehingga penanganan pengaduan bisa cepat diselesaikan.

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) dugaan kasus hasil pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan oleh Stasiun PSDKP Cilacap. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat bidang perikanan

No	Tanggal	Aduan	Sumber	Tindaklanjut
1	2-3 April 2023	Pengumpulan barang bukti distribusi LKR yang tidak dilengkapi dengan SKAB	Aduan	1. Mengamankan terduga kurir BBL berinisial SU (37 Tahun) dengan barang bukti BBL Jenis Pasir sebanyak 4.462 ekor dan BBL Jenis Mutiara sebanyak 364 ekor dengan nilai transaksi sebesar Rp.50.444.000,- 2. Saudara SU (37 Tahun), dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan/teguran tertulis I dan paksaan pemerintah dengan penghentian kegiatan distribusi/pengeluaran BBL di Sadeng 3. Barang bukti yang didapatkan di lepasliarkan yang dilakukan di pesisir Bantul dengan Nomor Berita Acara Pelepasliaran B.604.4/PSDKPSta.1/PW.140/IV/2023 Tanggal 4 April 2023

Perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU tersedianya data dan informasi intelijen perikanan antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

8. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU 11 Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, **IKU 12 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)** dan **IKU 13 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penganan Sanksi Administratif (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Capaian IKU 11, 12 dan 13 tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 11 Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	80	100	-
IKU 12 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	80	60	-
IKU 13 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penganan Sanksi Administratif	-	-	-	-	-	-	80	100	-

Capaian IKU 11 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 adalah 100, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 120%.

Capaian IKU 12 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2023 adalah 60, pencapaian ini tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80, sehingga persentase capaian hanya sebesar 75%. Terkait dengan pencapaian IKU yang tidak memenuhi target dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan data pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP antara pusat (Dit. PP) dan UPT PSDKP Cilacap. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan closing periode pemasukan data pada google sheet perkembangan hasil analisis pemantauan yang diisi secara kolektif, dimana Dit PP telah menghentikan (close) data pada 31 Desember 2023, sementara UPT memasukan dan memperhitungkan data yang masuk setelah closing periode dengan pertimbangan data tersebut masih merupakan data hasil pemantauan tahun 2023 (berdasarkan tanggal surat hasil pemantauan yang disampaikan Dit. POA) walaupun masuk dalam pengisian google sheet setelah 31 Desember 2023.
- 2) Terkait dengan pencapaian target yang belum sesuai, hal ini dikarenakan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh UPT Cilacap dalam proses pemeriksaan belum diperhitungkan dalam penghitungan sesuai dengan manual IKU. Proses pemeriksaan yang dimaksud antara lain croscheck analisis dugaan pelanggaran melalui RMC, komunikasi dan pemanggilan kepada pelaku usaha, koordinasi dan permintaan bantuan proses BAP kepada UPT lainnya, terkait dengan domisili kepemilikan kapal yang berbeda dengan lokus pelanggaran.
- 3) Jika tindak lanjut pada point 2) dapat diperhitungkan dengan pertimbangan proses (process) yang harus dilalui dan upaya (effort) yang telah dilakukan, maka, indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan tersebut, akan dapat tercapai sesuai target.
- 4) Terkait dengan point 2 dan 3, Stasiun PSDKP Cilacap telah pula mengirimkan surat permohonan penyempurnaan manual IKU kepada Sekretaris Ditjen PSDKP dengan nomor surat B.190/PSDKPSta.1/RC.610/I/2024 tanggal 23

Januari 2024. Capaian IKU 13 Indeks penyelesaian tindak lanjut peneraan sanksi administratif pada tahun 2023 adalah 100%, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 120%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU-IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis selalu melakukan monitoring dan pembinaan terkait penanganan kasus yang masih berjalan selama tahun 2023; serta
3. Pelaku usaha yang melanggar mengerti dan sadar hukum, sehingga peneraan sanksi dapat dengan lancar dilakukan.

Capaian IKU 11, 12 dan 13 pada tahun 2023 tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2023.

Penjelasan terkait masing-masing IKU sebagai berikut.

Pada pelaksanaannya IKU 11, 12 dan 13 ini turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP pada seluruh poin Program Turunan kecuali poin 5 "Pembersihan sampah plastik melalui kegiatan BCL". IKU ini menekankan kinerja dalam hal tindak lanjut kegiatan operasi/pengawasan peningkatan kepatuhan apabila terdapat sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran. Diharapkan dengan adanya ketiga IKU ini maka implementasi kebijakan Ekonomi Biru di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mencapai indikator kinerja yang berkaitan dengan peneraan sanksi administratif telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.350.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.70.348.950 atau 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada ketiga IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu: capaian kinerja pada 2 (dua) IKU termasuk kategori istimewa dan 1 (satu) IKU termasuk kategori baik dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 11 Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneraan sanksi

administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSKDP Cilacap berwenang dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap telah menangani sanksi administratif sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30. Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2023

NO	NAMA KAPAL/PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	PELANGGARAN	NO SURAT PENETAPAN DENDA
1	KM. Nusantara Mina Sejati	Sugiyanto	SPKP	B.89/DJPSDKP/PW.340/II/2023 tanggal 17 Februari 2023
2	KM. Pawit Mulya	Rosikin	Bongkat Muat Ikan	B.126/DJPSDKP/PW.150/II/2023 tanggal 28 Februari 2023
3	KM. Berkah Sejahtera 1	Sugiharjo	Bongkat Muat Ikan	B.277/DJPSDKP/PW.110/IV/2023 tanggal 6 April 2023
4	KM. Indah Lestari B	Mochammad Andika Firdaus	Tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	B.965/DJPSDKP/PW.340/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023
5	KM. Sari Mina Makmur	Direktur PT. Kelola Karya Makmur	Tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	978/DJPSDKP/PW.150/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023
6	KM. Tunas Sejati - I	Rosidah	Tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	B.1074/DJPSDKP/PW.110/XI/2023 tanggal 20 November 2023
7	KM. Charly Mitra Utama	Risma Aristiana Rohmatika	Tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	B.1073/DJPSDKP/PW.110/XI/2023 tanggal 20 November 2023
8	Sdr. Budhi Setiawan	Juwari	PKKPRL dan Reklamasi	B.949/DJPSDKP/PW.150/IX/2023
9	KM. Tiga Cahaya/ KM. Hero 2	Hendi Purwanto	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan perizinan	B.1149/DJPSDKP/PW.110/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023
10	KM. Merdeka Bahari	Sdr. H. Subchan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan perizinan yang berlaku	B.1148/DJPSDKP/PW.110/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023
11	KM. Mina Barokah Mulya	Ahmad Rois	Melakukan alih muat dari kapal perikanan	33/DJPSDKP/PW.150/II/2023 tanggal 22 Februari 2023
12	KM. Mulyo Joyo	Ahmad Rois	Melakukan alih muat dari kapal perikanan	32/DJPSDKP/PW.150/II/2023 tanggal 22 Februari 2023

Dalam pencapaian IKU 11, Stasiun PSDKP Cilacap telah merekomendasikan pengenaan denda sebanyak 10 kapal dengan besaran denda sejumlah Rp.313.320.440,- dan telah dilakukan pelunasan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif berupa denda didominasi oleh pelanggaran ketidak pemilikan persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP). Selain pengenaan denda sanksi administratif, pencapaian IKU 11 juga didukung dengan pengenaan pembekuan ijin yang dilakukan kepada 2 (dua) kapal yakni, KM. Mina Barokah Mulya dan KM. Mulyo Joyo.

Apabila dibandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan pencapaian IKU 11 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120 %
3	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120 %
4	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120 %
6	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120 %
7	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120 %
8	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120 %

IKU 12 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/menjadi perhatian publik.

Capain pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari pengenaan sanksi terhadap 517 Kapal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Penengenaan Sanksi Adm SPKP	Jumlah
1	Dalam Proses	64
2	Denda Adminitratif	11
3	Denda Adminitratif (Pengajuan Pusat)	42
4	Denda Adminitratif Terbakar	2
5	SP.1 (KEPALA STASIUN)	184
6	SP.2 (DIRJEN)	208
7	Tidak Melakukan Pelanggaran	6
Total		517

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan klarifikasi terhadap 453 kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan serta telah menerbitkan SP. 1, merekomendasikan SP. 2 dan pengenaan denda administratif. Hingga tanggal 31 Desember 2023 masih tersisa 64 kasus yang sedang dalam proses klarifikasi. Selain itu Stasiun PSDKP Cilacap juga telah merekomendasikan pengenaan denda administratif sebanyak 13 kapal dengan besaran denda sejumlah Rp.1.022.232.440,-, sebanyak 11 pelaku usaha dan telah melakukan pelunasan denda, sedangkan 2 sisanya diberikan keringanan PNBK berupa pembebasan denda dikarenakan telah terkena musibah kapal terbakar (atas dasar surat dari Menteri Keuangan nomor S-469/MK.2/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Persetujuan Permohonan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang Berupa Pembebasan Atas Nama Sdr. Syahrudin dan Sdr. Tarmin). Untuk saat ini kasus yang sedang dalam proses pengenaan denda administratif sejumlah 64 kasus.

Apabila di bandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 12 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	60	75 %
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120 %
3	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120 %
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120 %

5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120 %
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120 %
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120 %

IKU 13 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)

Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT PSDKP.

Capain IKU 13 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari pengenaan sanksi Pemilik KM. Rukun Jaya Makmur dan KM. Maju Jaya 04 yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 s.d 1 Desember 2023. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut telah dilakukan pembahasan agar mendorong kedua kapal yang di kenakan sanksi administratif dapat segera memenuhi perizinan berusaha. Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan atau pemilik kapal terhadap pemenuhan perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat nelayan Asemdayong untuk mengurus perizinan berusaha sebagaimana amanah dari UU Cipta kerja;
3. Membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami pentingnya memiliki perizinan berusaha dan menjaga sumber daya ikan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
4. Instansi terkait dapat berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya membangun masyarakat nelayan Asemdayong untuk taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Apabila di bandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 13 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%

9. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.2 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 14 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)**.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun Capaian IKU pada SK 4.2 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 35. Capaian IKU 14 tahun 2023

Indikator Kinerja	2020 TW 2		2021 TW 2		2022 TW 2		2023 TW 2		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 14 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	75	90	93	100	100

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2023 adalah sebesar 100, capaian ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk yaitu sebesar 93.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 14 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis ikut serta melakukan supervisi selama tahapan penanganan kasus; serta
3. Koordinasi baik dengan instansi terkait (Kejaksanaan, Polda, DKP, dan lain-lain).

Apabila dilakukan perbandingan antara capaian IKU 14 tahun 2023 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang terjadi dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini dikarenakan kasus yang muncul pada tahun 2022 masih dalam proses dan prosesnya melewati tahun berjalan, sehingga tidak bisa dianggap selesai, sehingga capaian 100 didapatkan pada tahun 2023 dimana kasusnya sudah diselesaikan (P21). Namun terdapat perbedaan nomenklatur pada IKU ini, pada tahun 2023 bunyi IKU nya adalah "Indeks penyelesaian", sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya berbunyi "Persentase efektivitas penyelesaian", sehingga pada perhitungan juga sedikit berbeda.

Pada tahun 2022-2023 Stasiun PSDKP Cilacap menangani penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 3 kasus, hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Rincian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Prakara	Tersangka	Perkembangan Kasus	Nilai Capain
2	KM. Margarena 1	Sugiyono Nurofik Bin Daim alias Sudiono Nurkolik alias Sugiyono Nurofik	P-21 & Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)	100
3	KM. Margarena 1	Riza Harnita alias Reza	P-21	100

Prakara yang di tangani Stasiun PSDKP Cilacap berjumlah 2 kasus dengan nama kapal yang sama yakni KM. Margarena 1, namun dengan nama tersangka

yang berbeda beda yakni Sugiyono Nurofik Bin Daim alias Sudiono Nurkolik alias Sugiyono Nurofik dan Riza Harnita alias Reza. Kedua prakara tersebut telah terselesaikan hingga 100%, yaitu telah mencapai tahap P-21 serta Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

Apabila dibandingkan antara IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 14 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	93%
2	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	93%
3	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
4	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	93%
6	Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	93%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	93	100	93%

Pada pelaksanaannya IKU 14 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan ini turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP pada seluruh poin Program Turunan kecuali poin 5 “Pembersihan sampah plastik melalui kegiatan BCL”. IKU ini menekankan kinerja dalam hal tindak lanjut kegiatan operasi/pengawasan peningkatan kepatuhan apabila terdapat sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Diharapkan dengan adanya IKU ini maka implementasi kebijakan Ekonomi Biru di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mencapai indikator kinerja yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.162.160.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.162.159.500 atau 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu: capaian kinerja pada IKU ini sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar 100%.

10. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) IKU. IKU tersebut terdiri dari:

- 1) **IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks);**
- 2) **IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks);**
- 3) **IKU 17 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 4) **IKU 18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 5) **IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks);**
- 6) **IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 7) **IKU 21 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan;**
- 8) **IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja;**
- 9) **IKU 23 Inovasi yang Dihasilkan (inovasi);**
- 10) **IKU 24 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%);**
- 11) **IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 12) **IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%);**
- 13) **IKU 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai);** serta
- 14) **IKU 28 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai).**

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 5.1 adalah sebagai berikut:

IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap, dalam hal ini adalah layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).

Perbandingan capaian IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Perbandingan capaian IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	82,87	80	81,83	80	87,90	80	90,03	80

Capaian IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Tahun 2023 tercapai dengan nilai 90,03, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SLO yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun pada awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya, namun seiring waktu berjalan hingga di tahun 2023 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan

yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 maka terdapat kenaikan nilai capaian >2. Begitu pula apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024, maka terdapat kenaikan nilai capaian sebesar 10,03.

Nilai capaian pada IKU ini didapatkan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 83 orang responden pengguna layanan SLO di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan IV tahun 2023, dengan latar pendidikan dari SD, SMP, SMA, DIII, S1 dan S2. Pelaksanaan survey dilakukan melalui website Si Susan KKP pada tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>.

Perbandingan Pencapaian IKU 15 dengan organisasi sejenis/setara pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan pencapaian IKU 15 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,03	112,54%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	79	98,75%
3	Stasiun PSDKP Biak	80	94,89	118,61%
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	88,50	110,63%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,03	113,79%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	93,62	117,03%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,63	118,29%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	94,14	117,68%

Untuk mencapai indikator Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.66.318.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 66.317.500,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap, dalam hal ini adalah layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan).

Perbandingan capaian IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Perbandingan capaian IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)	-	-	80	90,34	80	98,31	80	90,83	-

Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian IKU 16 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) pada tahun 2023 tercapai dengan nilai 90,83, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LVHPI yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Walaupun setelah diterbitkannya Permen KP No 10 Tahun 2021 permohonan LVHPI berkurang, karena saat ini LVHPI bukan merupakan salah satu syarat utama untuk penerbitan SHTI, namun pelayanan tetap dilakukan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang masih melakukan permohonan.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah terjadi peningkatan sebesar 0,49, sedangkan perbandingan dengan tahun 2022 menunjukkan hasil adanya penurunan nilai capaian namun tetap melebihi dari target yang telah ditetapkan, penurunan nilai capaian dengan tahun 2022 terjadi karena memasuki tahun 2023 permohonan LVHPI sudah berkurang drastis, bahkan ada bulan-bulan dimana sama sekali tidak ada pengajuan permohonan LVHPI. Capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Rincian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan LVHPI dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 10 orang responden pengguna layanan LVHPI di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode bulan April sampai dengan Juni 2023, dengan latar pendidikan dari SMP, SMA, dan S1. Pada bulan Juli sampai dengan Desember 2023 tidak ada permohonan LVHPI, maka dari itu penilaian SKM LVHPI didasarkan pada kuisisioner Triwulan sebelumnya.

Perbandingan Pencapaian IKU 16 dengan organisasi sejenis/setara pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,83	113,54%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,37	112,96%
3	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
4	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	86,45	108,06%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	97,08	121,35%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

Untuk mencapai indikator Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp.66.318.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 66.317.500,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 17 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Komponen penilaian untuk IKU 17 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun jika IKU 17 ini dinilai melalui penilaian mandiri maka dilakukan berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai 'menuju WBK' harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0; dan
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB/Tim Penilai Internal KKP. Perbandingan capaian IKU

17 Nilai WBK UPT Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan capaian IKU 17 dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 17 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	75	78,56	75	90,08	80	88,92	-

Pelaksanaan penilaian WBK Stasiun PSDKP Cilacap telah dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 oleh Tim Penilai ZI dari Sekretariat Ditjen PSDKP. Sesuai dengan Surat Dinas nomor B.163/PSDKPSta.1/TU.210/I/2024 perihal Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, nilai yang diperoleh Stasiun PSDKP Cilacap dalam penilaian mandiri WBK adalah 88,92. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 80.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah terjadi peningkatan sebesar 10,56. Sedangkan perbandingan dengan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan nilai yang disebabkan oleh 1 (satu) pegawai yang mendapatkan disiplin berat, sehingga mempengaruhi penilaian total ZI.

Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2021.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya IKU 17 pada Stasiun PSDKP Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan inovasi pelayanan CEKATAN untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa, selain itu pelayanan penerbitan SLO dilakukan Senin-Minggu untuk mengakomodir kebutuhan para pengguna jasa pada hari libur; dan
2. Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai cukup tinggi dari hasil penilaian mandiri dengan didampingi oleh Tim Penilaian ZI dari Sekretariat Ditjen PSDKP. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan dan pengarsipan data di Stasiun PSDKP Cilacap tergolong baik sehingga menyebabkan hasil nilai juga tinggi.

Perbandingan Pencapaian IKU 17 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	88,92	118,56%
2	Stasiun PSDKP Belawan	75	80,51	107,35%
3	Stasiun PSDKP Biak	-		
4	Stasiun PSDKP Ambon	-		
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	82,67	110,23%
6	Stasiun PSDKP Kupang	75	89,69	119,59%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	83,81	111,75%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	75	84,18	112,24%

Untuk mencapai indikator Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.318.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 66.317.500,- atau 88,92%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko

terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU 18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44. Perbandingan capaian IKU 18 dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.181/PSDKP.1/TU.210/I/2024 perihal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV TA.2023 Lingkup Ditjen. PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan pengendalian risiko terhadap 18 (delapan belas) rencana pengendalian dan pemantauan yang seluruhnya terdiri dari level risiko sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IKU 18 ini tercapai dengan persentase 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian pada IKU 18 ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian dengan tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2023.

Hal yang menyebabkan tercapainya IKU 18 pada Stasiun PSDKP Cilacap yaitu secara rutin telah dilakukan monev pengendalian SPIP setiap triwulan dengan melibatkan masing-masing Tim Kerja, pada kegiatan ini dibahas terkait tindak lanjut rencana pengendalian yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.847.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 24.839.498,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap memiliki nilai target 78. Perhitungan capaiannya dilakukan dengan metode pembobotan terhadap 4 variabel, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%), variabel ini berkaitan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK pangkat terakhir yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG;
2. Kompetensi (bobot 40%), variabel ini berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar;
3. Kinerja (bobot 30%), variabel ini berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN; dan
4. Disiplin (bobot 5%), variabel ini berkenaan dengan pernah/tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	72	75,26	73	75,18	77	80,17	78	88,26	72

IKU 19 ini diukur dengan periode pengukuran setiap Semester pada tahun berkenaan, pada Semester I tahun 2023 targetnya adalah 71 sedangkan pada Semester II tahun 2023 targetnya adalah 78.

Sesuai dengan Surat Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.169/PSDKP.1/KP.720/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja IP ASN Ditjen PSDKP Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 88,26, capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 78.

Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya IP ASN Stasiun PSDKP Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan monev kepegawaian dari Inspektorat Jenderal, utamanya untuk meningkatkan pemahaman para pegawai Stasiun PSDKP Cilacap terkait pentingnya mengikuti seminar dan Diklat 20 JP sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan IP ASN.

2. Stasiun PSDKP Cilacap juga telah beberapa kali melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan melibatkan narasumber dari Dinas Perikanan Kab/Prov dan Kementerian Investasi/BKPM yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengawas perikanan dan IP ASN.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang maka IKU 19 ini mengalami peningkatan >8. Peningkatan juga terjadi apabila dilakukan perbandingan antara capaian tahun 2023 dengan Renstra 2020-2024, yakni sebesar 16,26. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 47. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	78	88,26	113,15%
2	Stasiun PSDKP Belawan	78	87,76	112,51%
3	Stasiun PSDKP Biak	78	89,79	115,12%
4	Stasiun PSDKP Ambon	78	91,07	116,76%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	78	90,59	116,14%
6	Stasiun PSDKP Kupang	78	87,28	111,90%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	78	89,06	114,18%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	78	88,34	113,26%

Untuk mencapai indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 59.998.190,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 80,50. Perhitungan capaian didapatkan dari hasil penilaian mandiri pada aplikasi

<https://kinerjaku.kkp.go.id/> dan dilakukan asistensi dengan Tim Penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP.

Perbandingan capaian IKU 20 dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48. Perbandingan capaian IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	-	-	80,50	89,70	-

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 1336/PSDKP.1/TU.210/VIII/2023 perihal Penyampaian hasil verifikasi PM SAKIP lingkup Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 88,26, capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80,50. Hal yang menyebabkan tingginya capaian IKU ini adalah pemenuhan dokumen SAKIP Stasiun PSDKP dinilai lengkap dan mendapatkan nilai tambahan karena mencantumkan dokumen 5 (lima) tahun ke belakang.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru muncul pada tahun 2023.

Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 49. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80,5	89,7	111,43%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80,5	82,15	102,05%
3	Stasiun PSDKP Biak	80,5	78,80	97,89%
4	Stasiun PSDKP Ambon	80,5	83,30	103,48%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80,5	79,55	98,82%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80,5	81,2	100,87%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80,5	80,30	99,75%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80,5	84,8	105,34%

Untuk mencapai indikator Penilaian Mandiri SAKIP telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.45.373.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah

terrealisasi sebesar Rp. 45.370.620,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 21 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP No B.157/PSDKP.1/TU.140/I/2024 hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi pada periode Triwulan IV tahun 2023.

Target dan Capaian IKU 21 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 50. Perbandingan capaian IKU 21 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020 TW 2		2021 TW 2		2022 TW 2		2023 TW 2		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	70	100	75	100	-

Capaian IKU 21 pada tahun 2023 adalah sebesar 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 75.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2022, maka nilai capaiannya sama, karena dikedua tahun tersebut Stasiun PSDKP Cilacap sama-sama mendapatkan nilai 100. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan

dengan capaian Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2022. Perbandingan Pencapaian IKU 21 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51. Perbandingan pencapaian IKU 21 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	75	100	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	75	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	75	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120%

Untuk mencapai indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.30.824.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 30.824.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integitas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan;

(7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Target untuk IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP pada tahun 2023 adalah sebesar 21, yang diperoleh dari nilai implementasi program budaya kerja dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Target dan capaian IKU 22 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Perbandingan capaian IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	21	26,17	21	27,84	-

Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh capaian sebesar 27,84 untuk IKU 22, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 21. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi budaya kerja ASN BerAkhlak melalui zoom meeting yang diadakan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP dan diikuti oleh seluruh pegawai, kegiatan ini bertujuan agar seluruh pegawai dapat memahami dan menerapkan budaya kerja ASN BerAkhlak pada kehidupan kerja sehari-hari;
2. Aspek-aspek budaya kerja yang lain sudah diterapkan pada kegiatan pekerjaan sehari-hari, contoh: ketepatan waktu saat menghadiri pertemuan, menerapkan 5R, menggunakan aplikasi (portal KKP) dalam melaksanakan pekerjaan.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya, maka telah terjadi kenaikan sebesar 1,67. Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 53. Perbandingan pencapaian IKU 22 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	21	27,84	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	21	25,34	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	21	27,34	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	21	23,19	110,43%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	21	24,85	118,33%
6	Stasiun PSDKP Kupang	21	26,33	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	21	20,34	96,86%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan Implementasi Program Budaya Kerja telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.98.441.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 98.439.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 23 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pada tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan target sebanyak 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Target dan capaian IKU 23 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54. Perbandingan capaian IKU 23 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (inovasi)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 23 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (inovasi)	-	-	1	1	1	1	1	1	-

Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Stasiun PSDKP Cilacap telah menghasilkan masing-masing 1 (satu) inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2023 inovasi yang telah di hasilkan disebut dengan “Peci Miring” yang merupakan akronim dari Peta Kerawanan Cepat dan Informasi Bermanfaat, Mengedukasi dan Ringkas. Inovasi ini telah dipaparkan/disosialisasikan pada kegiatan Lomba Inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2023.

Hal-hal yang dapat meningkatkan penggunaan Peci Miring adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan SDM Pengawas Perikanan, dan PPNS Perikanan dalam memahami penggunaan ”Peci Miring”; serta
- b. Kelengkapan alat pengolah data (laptop, printer, jaringan internet).

Perbandingan pencapaian IKU ke-23 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55. Perbandingan pencapaian IKU 23 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	1	1	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	1	1	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	1	1	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100%

Untuk mencapai indikator inovasi yang dihasilkan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.029.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 20.029.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 24 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi *collaboration office* dengan target 92% pertriwulan pada tahun 2023.

Terdapat 2 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja; dan
2. Keaktifan: Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan pada aplikasi *collaboration office*.

Target dan capaian IKU 24 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 56. Perbandingan capaian IKU 24 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 24 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	82	100	82	100	86	98,06	92	108,33	82

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.165/PSDKP.1/RC.610/I/2024 perihal Capaian Manajemen Pengetahuan Terstandar Ditjen PSDKP Tahun 2023, pada Triwulan IV tahun 2023 Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 108,33%, sehingga untuk rata-rata capaian tahun 2023 adalah 99,12%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 92%.

Data dan informasi yang disajikan dalam *collaboration office* oleh Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Profil Stasiun PSDKP Cilacap/Satuan Pengawas (Satwas) SDKP/Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap, serta Inovasi yang dikembangkan di UPT.

Capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditentukan, dengan capaian tertinggi adalah pada tahun 2023. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 26,33. Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi sejenis/setara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 57. Perbandingan pencapaian IKU 24 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	92	108,33	117,75%
2	Stasiun PSDKP Belawan	92	123,33	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	92	100	108,70%
4	Stasiun PSDKP Ambon	92	121,67	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	92	85	92,39%
6	Stasiun PSDKP Kupang	92	133,33	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	92	8,33	9,05%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	92	120	120%

Untuk mencapai indikator penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.288.681.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 286.068.716,- atau 99.10%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan

pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh UPT dengan melakukan asistensi ke Tim Keuangan Umum, Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal II, KKP dengan target nilai 77,5. Target dan capaian IKU 25 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 58. Perbandingan capaian IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	72,5	100	75	100	77,5	100	-

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 49/PSDKP.1/PL.760/I/2024 perihal Hasil perhitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian sebesar 100%. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya yaitu 77,5%. Seluruh pengelolaan barang milik negara telah sesuai dengan rencana perencanaan belanja modal tahun 2023. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan BMN di Stasiun PSDKP Cilacap telah sesuai dan memenuhi seluruh syarat/ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU ini antara tahun 2021, 2022 dan 2023 telah sama-sama melebihi target dengan nilai 100%. Sedangkan untuk perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada

perencanaan dan penganggaran sehingga IKU terkait BMN baru dimunculkan pada tahun 2021. Perbandingan pencapaian IKU 25 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59. Perbandingan pencapaian IKU 25 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	77,5	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	77,5	100	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	77,5	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77,5	100	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	77,5	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	77,5	100	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	77,5	100	120%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 19.999.700,- atau 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); serta
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 30%).

Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh UPT dengan melakukan asistensi ke Tim Keuangan Umum, Sekretariat Ditjen PSDKP dan

Inspektorat Jenderal II, KKP dengan target nilai 77,5. Target dan capaian IKU 26 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 60. Perbandingan capaian IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	72,5	95	75	100	77,5	85,40	-

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 49/PSDKP.1/PL.760/I/2024 perihal Hasil perhitungan indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian sebesar 85,40%. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya yaitu 77,5%. Seluruh pengadaan barang dan jasa telah sesuai rencana perencanaan belanja modal tahun 2023. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Stasiun PSDKP Cilacap telah sesuai dan memenuhi seluruh syarat/ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU ini antara tahun 2021, 2022 dan 2023 telah sama-sama melebihi target dengan nilai bervariasi. Sedangkan untuk perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU terkait pengadaan barang/jasa baru dimunculkan pada tahun 2021. Perbandingan pencapaian IKU 26 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61. Perbandingan pencapaian IKU 26 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77,5	85,40	110,19%
2	Stasiun PSDKP Belawan	77,5	95,04	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	77,5	98,75	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	77,5	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77,5	100	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	77,5	95,04	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	77,5	95,94	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	77,5	94,64	120%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.021.774.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.021.771.620,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: Capaian Output, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, serta Dispensasi SPM.

Penghitungan capaian kinerja IKU 27 diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (spanint.kemenkeu.go.id) Kementerian Keuangan.

Target dan capaian IKU 27 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 62. Perbandingan pencapaian IKU 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	88	98,95	89	97,95	89	94,44	93,75	94,89	88

Sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian sebesar 94,89.

Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 93,75.

Sejak 3 (tiga) tahun kebelakang IKU ini selalu melebihi target dengan nilai di atas 90. Perbandingan antara capaian tahun 2023 dengan Renstra 2020-2024 menunjukkan kenaikan capaian sebesar 6,89. Perbandingan pencapaian IKU 27 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63. Perbandingan pencapaian IKU 27 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93,75	94,89	101,22%
2	Stasiun PSDKP Belawan	93,75	92,67	98,85%
3	Stasiun PSDKP Biak	93,75	94,73	101,05%
4	Stasiun PSDKP Ambon	93,75	92,42	98,58%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93,75	92,45	98,61%
6	Stasiun PSDKP Kupang	93,75	97,14	103,62%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	93,75	93,24	99,46%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	93,75	96,36	102,78%

Untuk mencapai penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.30.824.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 30.824.000,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU 28 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL yang diinput oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Berikut rincian pada pengukuran dan penarikan data capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran:

- a. Pengukuran capain IKU NKA dilakukan pada Semester II (akhir tahun);

- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Target dan capaian IKU 28 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 64. Perbandingan pencapaian IKU 28 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T
IKU 28 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	-	86	93,93	81	85,36	82	85,93	-

Sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan capaian sebesar 85,93. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 82.

Sejak 2 (tiga) tahun kebelakang IKU ini selalu melebihi target dengan nilai di atas 85. Namun perbandingan antara capaian tahun 2023 dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2021.

Perbandingan pencapaian IKU 28 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Perbandingan pencapaian IKU 28 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 65. Perbandingan pencapaian IKU 28 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

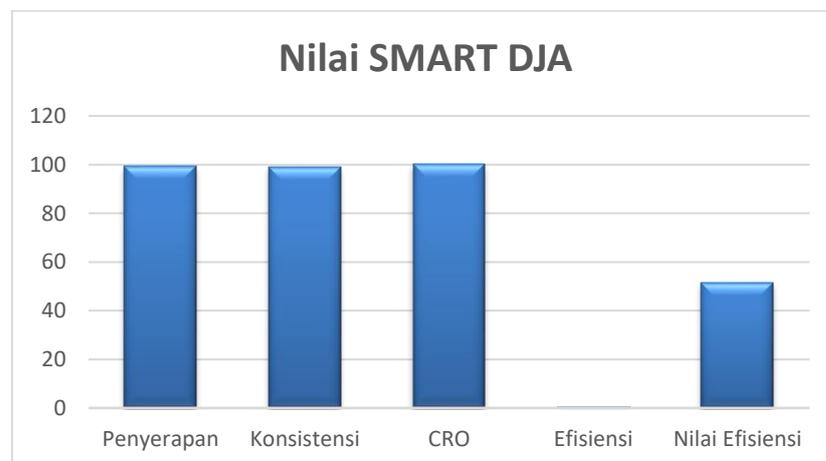
No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	82	85,93	104,79%
2	Stasiun PSDKP Belawan	82	86,2	105,12%
3	Stasiun PSDKP Biak	82	85,83	104,67%
4	Stasiun PSDKP Ambon	82	87,67	106,91%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	82	85,92	104,78%

6	Stasiun PSDKP Kupang	82	84,64	103,22%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	82	85,87	104,72%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	82	88,61	108,06%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.220.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 70.215.118,- atau 100%, Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya efisien. Hal ini didasari oleh capaian kinerja yang sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

C. Efisiensi

Pengukuran untuk nilai efisiensi anggaran dilakukan dengan menginput data realisasi oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Hasil efisiensi anggaran pada Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2023 adalah 0,67 dengan rincian seperti pada gambar sebagai berikut:



Gambar 14. Nilai SMART melalui aplikasi SMART DJA

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: DS: 0000-3330-7707-3704 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar **Rp.29.692.761.000,-** (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*). Namun seiring waktu berjalan terdapat perubahan pada kegiatan dan revisi pada anggaran yang menyebabkan anggaran yang dikelola Stasiun PSDKP Cilacap bertambah menjadi **Rp.30.376.404.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh*

Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah). Hingga 31 Desember 2023 realiasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar **99,33%** atau sebesar **Rp.30.174.233.965**.

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 66. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP tahun 2023

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan	11.660.587.000	11.592.634.066	99,42	67.952.934
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	232.510.000	232.508.450	100	1.550
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	432.545.000	432.535.936	100	9.064
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.100.000.000	1.093.333.944	99,39	6.666.056
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Internal Lingkup Ditjen PSDKP	16.950.762.000	16.822.490.717	99,24	128.271.283
TOTAL		30.174.233.965	30,173,503,113	99,33	202,900,887

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 5 Januari 2024

E. Penghargaan

Selama tahun anggaran berjalan (TA. 2023), Stasiun PSDKP telah mendapatkan penghargaan dari instansi eksternal. Perhargaan yang diterima adalah penghargaan untuk kinerja anggaran Stasiun PSDKP Cilacap. Penghargaan yang diterima dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 67. Penghargaan yang Diterima Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Satuan Kerja Terbaik I Kategori Jumlah Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2023	KPPN Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap



Gambar 15. Stasiun PSDKP Cilacap menerima penghargaan Terbaik I dari KPPN Cilacap

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun 2023 adalah sebesar 104,19%. Nilai NKO tersebut terdiri dari perhitungan 28 IKU dengan rincian: 15 (lima belas) IKU berwarna biru (teralisasi 110-120%), 12 (dua belas) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%) dan 1 (satu) IKU berwarna kuning (teralisasi 70-<90%) yang sedang dalam proses penyempurnaan IKU.
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada periode tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan dengan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada Triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan terukur sebagai tindak lanjut program priotas KKP;
2. Melaksanakan kegiatan klarifikasi pelanggaran SPKP kapal perikanan; serta
3. Mencapai target realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 25%.

Rencana tindak lanjut:

1. Perlunya dilakukan mekanisme piket untuk tindak lanjut pengawasan penangkapan ikan terukur utamanya di Pelabuhan yang ditunjuk sebagai percontohan PIT (utamanya di PP. Tegalsari dan PPS Cilacap);

2. Mendorong pelaksanaan klarifikasi pelanggaran SPKP kapal perikanan dengan cara mengirim bantuan pengawas perikanan dari Satwas/Wilker lain untuk melakukan BAP di lokasi dengan pelanggaran terbanyak (Tegal dan Pati);
3. Melaksanakan realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun oleh masing-masing Tim Kerja, sehingga target realisasi Triwulan I Tahun 2024 dapat tercapai.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Erik Sostenes**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Adin Nurawaluddin</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN PSDKP CILACAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		ISK1.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administrative bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	75

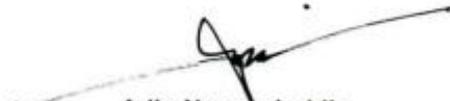
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
		ISK5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	78
		ISK5.1.6	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	90
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	92
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5
		ISK5.1.12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5
		ISK5.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	89
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	732.545.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.902.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10.026.607.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	320.800.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.710.809.000
Total Anggaran		29.692.761.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Hasil Revisi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: djtjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Erik Sostenes**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

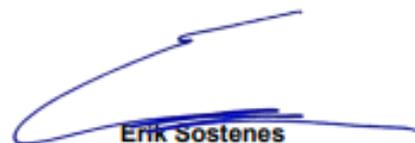
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap


Adin Nurawaluddin


Erik Sostenes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN PSDKP CILACAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		ISK1.3.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	78
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80,5
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	92
		ISK5.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77,5
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,75
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.660.587.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	432.545.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</i>	
SK2.2	<i>Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.100.000.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</i>	
SK3.2	<i>Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	232.510.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</i>	
SK4.2	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.950.762.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		30.376.404.000

Cilacap, November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap


Adin Nurawaluddin


Erik Sostenes